

**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2013 – 2017**

Oleh :

**Julia Jasmine**

**Pembimbing : Emrinaldi dan Hariadi**

*Faculty of Economics and Bussiness Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Email : [juliajasmine1307@gmail.com](mailto:juliajasmine1307@gmail.com)

*The Effect of Accounting Conservatism, Independent Board of Commissioner, Sales Growth, Executive Share Ownership and Corporate Social Responsibility Against Tax Avoidance on Plantation Company Listed on BEI 2013-2017*

**ABSTRACT**

*This research aimed to examine the impact of Accounting Conservatism, Independent Board of Commissioners, Sales Growth, Ownership of Executive Shares and Corporate Social Responsibility against tax avoidance on plantation companies and this research aimed to examine the effect from the variables that could be significantly influence or not against Tax Avoidance. The sample used in this research is based on criteria that have been set and totally amounted 12 samples with a total of 40 data from plantation company that listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2017. This research used purposive sampling method and testing the hypothesis using double linear regression analysis test (Using SPSS 18.0). The result from this research showed that Independent Board of Commissioners, Sales Growth, Executive Share Ownership and Corporate Social Responsibility partially have a significant influence against tax avoidance and Accounting Conservatism do not have a significant partial effect against tax avoidance. Results of coefficient of determination (adjusted  $R^2$ ) has a value 0.416. This mean that the overall effect of independent variables against Tax Avoidance amounted 41.6%, while the remaining 58.4% is influenced by other independent variables.*

*Keywords : Tax Avoidance, Accounting Conservatism, Independent Board of Commissioners, Sales Growth, Executive Share Ownership, Corporate Social Responsibility.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melaksanakan

pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya

tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Pohan, 2015)

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program – program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya (Pohan, 2015). Bagi pemerintah, pajak merupakan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal, yang biasanya dikenal dengan istilah agresivitas pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2013).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu sebuah perusahaan yang terafiliasi perusahaan di

Singapura, yakni PT RNI diduga melakukan upaya penghindaran pajak, mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan PP 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. (<http://ekonomi.kompas.com/2016>)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Sarra (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak“. Beberapa perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan Sarra (2017) yaitu: pertama, penelitian ini mengeluarkan variabel komite audit dan menambahkan variabel Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Tanggung Jawab Sosial. Perbedaan kedua pada penelitian ini adalah perusahaan yang dijadikan sampel serta tahun penelitian yang digunakan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Apakah Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Tanggung Jawab Sosial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk memahami pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. 2). Untuk

mengidentifikasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak. 3). Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak 4). Untuk Menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif pada penghindaran pajak. 5). Untuk Mengevaluasi pengaruh Tanggung Jawab Sosial pada penghindaran pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak**

Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Implikasi konsep ini terhadap pelaporan keuangan adalah bahwa pada umumnya akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi tetapi tidak mengantisipasi (mengakui lebih dulu) untung atau pendapatan yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. ( Suwardjono, 2014)

Mills (1998) dalam Suprianto dan Dewi (2014) menyatakan bahwa pengukuran dalam laba akuntansi menurut metoda akuntansi komersial tidak independen terhadap pengukuran menurut fiskal, sehingga diduga konservatisme akuntansi menyebabkan penetapan pajak penghasilan menurut perusahaan lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan menurut fiskus. (Kurniaty, 2017:5).

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam hubungan keagenan, pemilik saham sebagai *principal* menginginkan agar manajer sebagai *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. *Principal* menginginkan *agent* untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi biaya, termasuk biaya pajak yang timbul dari jumlah pertambahan kekayaan yang dimiliki *principal*. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen menghambat kepentingan pemilik saham karena komisaris independen yang memiliki fungsi pengawasan dan diasumsikan tidak terpengaruh dengan kepentingan pemillik saham akan sebisa mungkin meminimalkan tindakan efisiensi biaya pajak atau penghindaran pajak. (Prayogo, 2013)

Menurut Prakosa (2014), jika jumlah dewan komisaris independen meningkat maka tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen akan menurun, sehingga jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dapat menekan adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Menurut Perdana (2013), pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang

akan dihasilkan pun akan meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula. (Dewinta dan Setiawan, 2016)

Secara logika, ketika tingkat pertumbuhan penjualan sebuah perusahaan tinggi, laba yang dihasilkan perusahaan juga tinggi. Laba yang tinggi tersebut akan menyebabkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara menjadi tinggi. Hal ini akan mendorong manajer-manajer perusahaan untuk mencari cara bagaimana terhindar dari beban pajak yang besar tersebut.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan saham oleh direksi dapat dengan cara membeli sendiri atau melalui program khusus perolehan saham yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat mendorong manajemen memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012) dalam Putri, dkk (2016).

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif mampu mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa eksekutif sebagai seorang individu akan melaksanakan sesuatu jika ia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Dengan adanya

kepemilikan saham, seorang eksekutif juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sehingga baik secara langsung atau tidak langsung, aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak perusahaan. (Hanafi dan Harto, 2014). Kepemilikan saham eksekutif diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak**

Kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan untuk menghindari pajak dilakukan bukanlah tanpa sengaja. Begitu pula dengan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan, manajer bisa jadi memiliki tujuan tertentu untuk mengungkapkan CSR. Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan bisa menjadi salah satu cara owner untuk melakukan *tax avoidance* (Tiarawati, 2015)

Menurut M. Iqbal Alamsyah (2010) dalam Tiarawati (2015), cara untuk meminimalkan pajak yang ditanggung perusahaan dalam aktivitas CSR adalah melalui strategi yang diterapkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari sudut Pajak Penghasilan, perusahaan

biasanya memilih strategi khusus sehingga biaya yang dikeluarkan untuk program CSR dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sementara dari sudut Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan biasanya memilih strategi tertentu sehingga barang atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima tidak terutang PPN ataupun kalau terutang diupayakan seminimal mungkin.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Tanggung Jawab Sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 65 data pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BEI yang terdapat di situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Defenisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

#### a) Penghindaran Pajak

*Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yaitu kas

yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

$$CETR_{it} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

#### b) Konservatisme Akuntansi

Konservatisme dapat didefinisikan sebagai praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespons berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespon berita baik (*good news*) (Basu dalam Baharudin dan Wijayanti, 2011).

Menurut Givoly dan Hayn (2002) dalam Ahmed dan Duellman (2007) konservatisme dapat diukur dengan menggunakan metode akrual. Apabila akrual bernilai negatif, maka laba dapat dikategorikan konservatif. (Astrian, et. al, 2015:6). Dengan rumus:

$$KON\_ACC = \frac{NI - CF}{RTA}$$

#### c) Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Ginting, 2016:167)

Rumus untuk menghitung komisaris independen yaitu :

Kom. Independen =

$$\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

#### d) Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy, dkk, 2013) dalam Dewinta dan Setiawan (2016:1600).

Rumus untuk menghitung pertumbuhan penjualan, yaitu :

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan akhir periode} - \text{Penjualan awal periode}}{\text{Penjualan awal periode}} \times 100\%$$

#### e) Kepemilikan Saham Eksekutif

Kepemilikan saham eksekutif merupakan bagian dari pemilik saham dari suatu perusahaan dimana secara langsung atau tidak langsung aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan. (Mayangsari, 2015)

Rumus untuk menghitung kepemilikan saham eksekutif, yaitu :

$$\text{Kepemilikan Saham Eksekutif} = \frac{\text{Jumlah Saham Direksi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

#### f) Tanggung Jawab Sosial

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012).

Pengukuran Tanggung Jawab Sosial dilakukan dengan menggunakan checklist yang mengacu pada data dari *Global Reporting Initiative* (GRI 3.1). Jumlah pengungkapan item yang diharapkan untuk diungkapkan

perusahaan sebanyak 79 item. Apabila item *i* diungkapkan perusahaan maka diberikan nilai 1, jika item *i* tidak diungkapkan perusahaan maka diberikan nilai 0. Rumus yang digunakan untuk menghitung CSRI sebagai berikut:

$$\text{CSRI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normalitas distribusi dari data yang diambil. Jika variasi yang dihasilkan dari data memiliki distribusi data yang tidak normal, maka tes statistik yang dihasilkan pun menjadi tidak valid.

Untuk menguji normalitas pada penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai *Asymptotik Significance* > 0,05 maka data terdistribusi normal.

#### Uji Asumsi Klasik

##### a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian dengan matriks korelasi untuk menguji ada atau tidaknya korelasi yang muncul diantara variabel-variabel independen. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10.

##### b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu *t-1* (sebelumnya). Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian *Durbin-Watson* (DW).

### c) Uji Heterokodastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi apakah terdapat atau terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser.

Konservatism e	40	-,062	,1198	,0185	,04421
Kom. Independen	40	25	66,67	40,36	9,125
Pertumbuhan Penjualan	40	-35,03	72,5	11,98	23,972
Kepm. Saham Eksekutif	40	,000	3,21	,2395	,7580
Tanggung Jawab Sosial	40	,000	,693	,3950	,13964
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Data Olahan SPSS

### Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini diolah menggunakan SPSS 18.

Persamaan regresi linear berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y : Penghindaran Pajak
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$  : Koefisien Regresi
- X1 : Konservatisme Akuntansi
- X2 : Dewan Komisaris Independen
- X3 : Pertumbuhan Penjualan
- X4 : Kepemilikan Saham Eksekutif
- X5 : Tanggung Jawab sosial
- $\epsilon$  : *Error*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil perhitungan statistik deskriptif :

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	40	,000	,9810	,3546	,2398

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki mean sebesar 0,3546 dengan standar deviasi sebesar 0,2398. Variabel Konservatisme akuntansi memiliki mean sebesar 0,185 dengan standar deviasi sebesar 0,4421. Variabel Dewan Komisaris Independen memiliki nilai mean sebesar 40,36 dengan standar deviasi 9,125. Variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai mean sebesar 11,98 dengan standar deviasi sebesar 23,972. Variabel kepemilikan saham eksekutif memiliki nilai mean sebesar 0,2395 dengan standar deviasi sebesar 0,7580. Variabel Tanggung Jawab Sosial memiliki mean sebesar 0,3950 dengan standar deviasi sebesar 0,13964.

Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap kualitas data dan asumsi klasik. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, disimpulkan bahwa variabel konservatisme akuntansi, komisaris independen, pertumbuhan penjualan, dan tanggung jawab sosial memiliki data yang terdistribusi normal. Sedangkan variabel kepemilikan saham eksekutif memiliki data yang terdistribusi tidak normal. Terjadinya tidak normal pada data sampel dikarenakan tidak semua eksekutif memiliki saham pada perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini

ditunjukkan dengan nilai terendah variabel kepemilikan saham adalah 0% dan nilai tertingginya 3,2078%. Artinya, variasi kepemilikan saham pada perusahaan sampel tergolong rendah, sehingga menimbulkan adanya tidak normal pada data yang diambil.

Berdasarkan hasil atas pengujian asumsi klasik, disimpulkan bahwa model pada penelitian ini terbebas dari asumsi klasik.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen dalam regresi. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada Tabel 2 :

**Tabel 2**  
**Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R.Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	,701 <sup>a</sup>	,491	,416	,18326

Sumber : Data Olahan SPSS

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* (R<sup>2</sup>) sebesar 0,416. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Tanggung Jawab Sosial memberikan pengaruh 41,6% terhadap penghindaran pajak, sedangkan sisanya 58,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

### Hasil Analisis Regresi Berganda

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	B	t	Sig.
1 (Constant)	,238	1,392	,173
Konservatisme	-1,077	-1,481	,148
Kom. Independen	,010	2,855	,007
Pertumbuhan Penjualan	-,006	-4,800	,000
Kepr. Saham Eksekutif	-,635	-2,570	,015
Tanggung Jawab Sosial		-2,726	,010

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan Tabel 3 diatas, persamaan regresi berganda yang diuji dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = 0,238 - 1,077X_1 + 0,01X_2 - 0,006X_3 - 0,635X_4 - 0,635X_5 + \epsilon$$

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Dari Tabel 3, diketahui nilai signifikansi konservatisme akuntansi sebesar 0,148 (0,148 > 0,05) yang berarti variabel konservatisme akuntansi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat didukung dengan nilai t<sub>hitung</sub> yang lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai t<sub>tabel</sub> (t<sub>hitung</sub> < t<sub>tabel</sub> = 1,481 < 2,021). Dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan “Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak”, dinyatakan **ditolak**.

Hal ini dikarenakan, dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Prinsip konservatisme pada beberapa kebijakan pemerintah seperti tidak diperkenalkannya membentuk cadangan piutang ragu – ragu, kecuali untuk bank dan *leasing* dengan hak opsi serta perusahaan asuransi dan cadangan biaya reklame untuk usaha

pertambahan dan hanya menggunakan metode harga perolehan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) tidak boleh menggunakan (LIFO) untuk menilai persediaan dan pemakaian untuk perhitungan harga pokok. (Arafat dan Kartika, 2014)

Hal ini sejalan dengan penelitian Sarra (2017:83) yang menyatakan bahwa prinsip konservatisme digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan, akan tetapi prinsip konservatisme akuntansi merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba.

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Dari Tabel 3, diketahui nilai signifikansi dewan komisaris independen sebesar 0,007 ( $0,007 < 0,05$ ) yang berarti variabel dewan komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat didukung dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,855 > 2,021$ ). Dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan “Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak”, dinyatakan **diterima**.

Besarnya nilai koefisien regresi variabel Dewan Komisaris Independen adalah 0,01, yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap dewan komisaris independen sebesar 1 maka akan menaikkan nilai penghindaran pajak perusahaan

sebesar 0,01 dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah tetap.

Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen akan cenderung semakin tinggi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyak komisaris yang berasal dari luar perusahaan menyebabkan sulitnya komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris. Sehingga kinerja mereka dalam pengawasan dan pengendalian kinerja direksi atau manajer menjadi kurang efektif.

### **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Dari Tabel 3, diketahui bahwa nilai signifikansi pertumbuhan penjualan sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti variabel pertumbuhan penjualan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat didukung dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar nilainya dibandingkan nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel} = 4,800 > 2,021$ ). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak”, dinyatakan **diterima**.

Besarnya nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Penjualan adalah  $-0,006$ , yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan penjualan sebesar 1 maka akan menurunkan nilai penghindaran pajak perusahaan sebesar  $-0,006$  dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah tetap.

Dalam penelitian ini, pertumbuhan penjualan berpengaruh

signifikan negatif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan semakin tinggi. Ketika laba yang dihasilkan perusahaan tinggi, maka kompensasi yang diterima pihak manajemen juga tinggi. Kompensasi yang tinggi tersebut menyebabkan tindakan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak menurun.

### **Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak**

Dari Tabel 3, diketahui bahwa nilai signifikansi kepemilikan saham eksekutif sebesar 0,015 ( $0,015 < 0,05$ ) yang berarti variabel kepemilikan saham eksekutif secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat didukung dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,570 > 2,021$ ). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa “Kepemilikan Saham Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak”, dinyatakan **diterima**.

Besarnya nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Saham Eksekutif adalah  $-0,031$ , yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap kepemilikan saham eksekutif sebesar 1 maka akan menurunkan nilai penghindaran pajak perusahaan sebesar  $-0,031$  dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah tetap.

Dalam penelitian ini, kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan negatif. Hasil

ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan manajerial kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh manajerial akan membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga manajer sadar untuk membayar kewajibannya yaitu pajak terutang perusahaan.

### **Pengaruh Tanggung Jawab Sosial terhadap Penghindaran Pajak**

Dari Tabel 3, diketahui bahwa nilai signifikansi tanggung jawab sosial sebesar 0,01 ( $0,01 < 0,05$ ) yang berarti variabel tanggung jawab sosial secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat didukung dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,726 > 2,021$ ). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak”, dinyatakan **diterima**.

Besarnya nilai koefisien regresi variabel Tanggung Jawab Sosial adalah  $-0,635$ , yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap tanggung jawab sosial sebesar 1 maka akan menurunkan nilai penghindaran pajak perusahaan sebesar  $-0,635$  dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah tetap.

Dalam penelitian ini, tanggung jawab sosial berpengaruh signifikan negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena aktivitas CSR

merupakan suatu tindakan yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial, lingkungan dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dengan nilai CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sosial dan lingkungan, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil dan perusahaan akan membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena, dengan membayar pajak berarti perusahaan mendukung pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, dengan model dan metode serta pengujian atas hipotesis yang diasumsikan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian atas hipotesis pertama (H1) **ditolak**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Selain itu, prinsip konservatisme digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan, akan tetapi merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi

yang lebih tinggi untuk mengakui laba.

2. Hasil pengujian atas hipotesis kedua (H2) **diterima**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, semakin banyak komisaris yang berasal dari luar perusahaan menyebabkan sulitnya komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris. Sehingga kinerja mereka dalam pengawasan dan pengendalian kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan menjadi kurang efektif.
3. Hasil pengujian atas hipotesis ketiga (H3) **diterima**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan semakin tinggi. Ketika laba yang dihasilkan perusahaan tinggi, maka kompensasi yang diterima pihak manajemen juga tinggi. Kompensasi yang tinggi tersebut menyebabkan tindakan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak menurun.
4. Hasil pengujian atas hipotesis keempat (H4) **diterima**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh manajerial akan membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga manajer sadar

untuk membayar kewajibannya yaitu pajak terutang perusahaan.

5. Hasil pengujian atas hipotesis kelima (H5) **diterima**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan nilai CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sosial dan lingkungan, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil dan perusahaan akan membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena, dengan membayar pajak berarti perusahaan mendukung pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat analisis atau alat uji yang berbeda dengan penelitian ini serta memperluas maupun mengganti populasi atau sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak, mengingat penelitian ini hanya memiliki pengaruh 41,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan sehingga memberikan

hasil penelitian yang lebih konsisten.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astrian, Afri et. al. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Bung Hatta Vol 6, No 1 (2015)
- Baharudin, Ahmad Arif dan Provita Wijayanti. 2011. *Mekanisme Corporate Terhadap Konservatisme Akuntansi Di Indonesia*. Dinamika Sosial Ekonomi Vol. 7 No. 1 Edisi Mei 2011
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal. Universitas Islam Sultan Agung.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3. Maret (2016): 1584-1613
- Ginting, Suriani. 2016. *Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Wira Ekonomi Mikrosil. Vol. 6, No. 02, Okt 2016.

- Hanafi, Umi dan Puji Harto. 2014. *Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 3, No. 2, Tahun 2014
- Kurniaty. 2017. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Aggresivitas Tax Avoidance*. Jurnal UNTAN, Vol 1, No.4 (2017).
- Lanis, R., dan G.Richardson. 2012. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : an Empirical Analysis*. *Journal of Accounting and Public Policy*. pp. 86-108.
- Mayangsari, Cindy. 2015. *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Pohan, H.T. 2009. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Pajak Efektif, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol.4 No.2: 112-135
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram. Lombok.
- Putri, Elvia Shinta Aries Tantia, dkk. 2016. *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Bung Hatta Vol 9, No 1 (2016)
- Sarra, Hustna Dara. 2017. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak*. *Competitive*, Vol.1 No.1, Januari – Juni 2017.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi : Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPF.
- Tiarawati, Winda Agustina. 2015. *Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*,

Vol.4 No.2 Juli 2015,  
Hal.123-142.

[http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.  
Modus.Penghindaran.Pajak.  
Perusahaan.Jasa.Kesehatan.  
Asal.Singapura,](http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura) diakses  
tanggal 18 November 2017

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)